

**PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGGARAN BANTUAN
SOSIAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI SE-SUMATERA TAHUN
2018-2022**

Skripsi

Oleh

Adji Ansyori

1911021034



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGGARAN BANTUAN SOSIAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI SE-SUMATERA TAHUN 2018-2022

Oleh

Adji Ansyori

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, pendidikan, bantuan sosial, dan pengangguran terbuka menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Anggaran Bantuan Sosial (BS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Persentase Penduduk Miskin (PM) di provinsi-provinsi se-Sumatera pada periode 2018–2022. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) menggunakan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Anggaran Bantuan Sosial (BS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan. Variabel BS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pendidikan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Bantuan Sosial, Pengangguran, Data Panel

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AVERAGE YEARS OF SCHOOLING, SOCIAL ASSISTANCE BUDGET, AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON THE POVERTY RATE IN PROVINCES OF SUMATRA, 2018–2022

By

Adji Ansyori

Poverty remains a persistent issue in developing countries, including Indonesia. Among the various factors influencing poverty levels, education, social assistance, and open unemployment are crucial aspects that warrant further examination. This study aims to analyze the influence of Average Years of Schooling (AYS), Social Assistance Budget (SAB), and Open Unemployment Rate (OUR) on the Poverty Rate (PR) across provinces in Sumatra during the 2018–2022 period. The method used is panel data regression with the Random Effect Model (REM), based on secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance. The results show that Average Years of Schooling (AYS) has a negative and significant effect on poverty. Conversely, the Open Unemployment Rate (OUR) has a positive and significant effect. However, the Social Assistance Budget (SAB) does not show a significant effect. These findings suggest the need to improve education quality and ensure that social assistance programs are more accurately targeted to effectively reduce poverty levels.

Keywords: *Poverty, Education, Social Assistance, Unemployment, Panel Data.*

**PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGGARAN BANTUAN
SOSIAL, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI SE-SUMATERA TAHUN
2018-2022**

**Oleh
Adji Ansyori**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
ANGGARAN BANTUAN SOSIAL, DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN PROVINSI SE-SUMATERA
TAHUN 2018-2022.**

Nama Mahasiswa

: **Adji Ansyori**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1911021034

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP 197404102008122001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

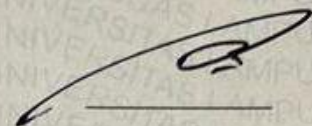
Dr. Arivina Ratih, Y.T, S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

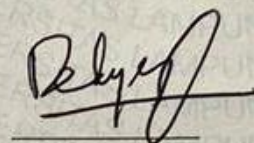
Ketua

: Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



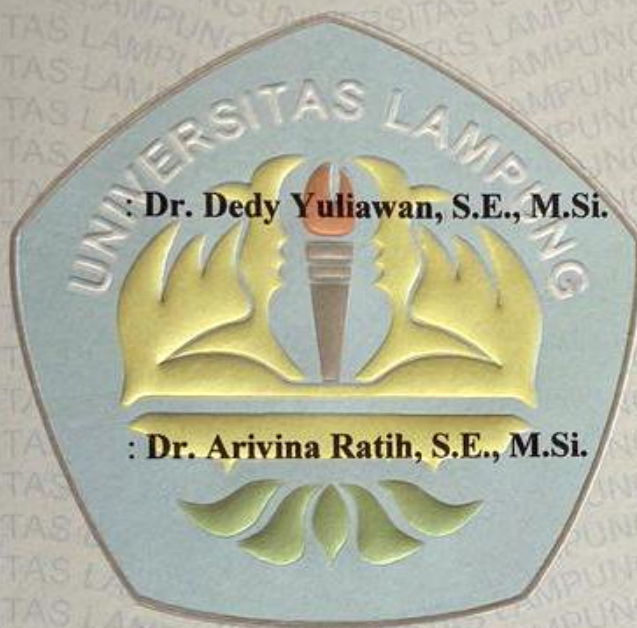
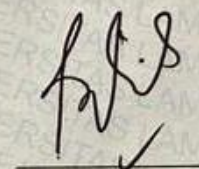
Penguji I

: Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



Penguji II

: Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Agustus 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adji Ansyori

NPM : 1911021034

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin Provinsi Se-Sumatera Tahun 2018-2022” adalah hasil karya yang saya kerjakan sendiri. Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2025
Penulis



Adji Ansyori
1911021034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Adji Ansyori**, dilahirkan di Bandar Lampung 11 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Kamsani dan Ibu Rasti. Penulis menempuh Pendidikan di TK Nurul Islam tahun 2006, SDN 1 Sukaraja tahun 2007, SMP N 11 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK N 4 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 penulis diterima Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi seperti menjadi Reporter kemudian Pengabdian Masyarakat di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi Kepala Divisi Humas Rois FEB Unila. Kemudian juga menjadi Pemimpin Penelitian dan Pengembangan PILAR Ekonomi FEB Unila tahun 2023.

Penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Publik dan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 periode I di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

MOTTO

“Perubahan tidak datang dari mereka yang hanya menunggu dan mengeluh, tetapi dari mereka yang terus bergerak dan berjuang”

(Anies Rasyid Baswedan)

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati dalam mencobanya” **(Muhammad Al Fatih)**

“They didn’t believe in us

Who did?

God did”

(Khaled Mohamed Khalid)

“If you have a strong will for something, believe the world and the universe will work together to make it happen.”

(Adji Ansyori)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas terucap selain Alhamdulillah rabbi'l'alamin atas segala Rahman dan Rahim-Nya, shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan Muhammad Rasulullah shlallahu 'alaihi wasallam. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang,

Bapak Kamsani dan Ibu Rasti.

Terimakasih atas segala kasih sayang tak terbatas, atas segala do'a yang tak henti terucap, atas segala usaha yang tak mungkin bisa terbalas, sehingga saya mampu menyelesaikan karya tulis ini. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, nasihat, dan kesabaran dalam mendidik saya hingga saat ini, saya percaya itu semua sematamata untuk keberhasilan dan kesuksesan saya sebagai anaknya di kemudian hari.

Adik-adikku tersayang,

Dwi Cahyani, Prayoga, Prayogi, Kinara Radisti.

Terimakasih telah menjadi saudara yang selalu mendukung, membantu, dan pengertiannya dalam kondisi apapun. Terimakasih atas semua hal yang merepotkan dan terimakasih sudah menjadi alasan kuat untuk kakak mu ini dalam menyelesaikan skripsi.

Keluarga Besar, Bapak Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan

Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi serta ilmu yang bermanfaat selama pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin Provinsi Se-Sumatera Tahun 2018-2022 “** yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung. Dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mendapat dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak untuk membantu proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan, Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing untuk penulis, Terimakasih atas waktu yang diberikan untuk membimbing menulis skripsi ini dari awal sampai akhir, dengan dukungan yang kuat, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penulis, memberikan arahan, ilmu, serta nasihat yang luar biasa, dan juga saran hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan pelayanan dan bantuannya kepada penulis untuk kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kedua orangtuaku, Bapak Kamsani dan Ibu Rasti, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, semangat, dan do'a terbaiknya untuk anaknya ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan.
8. Untuk Adik-adikku, Dwi Cahyani, Prayoga, Prayogi, dan Kinara Radisti, terimakasih atas segala dukungan dan do'anya, menjadi acuan penulis untuk segera meraih gelar sarjana agar bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian.
9. Kepada Debita Alvia Husna terimakasih atas dukungannya serta motivasinya agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi, semangat yang selalu diberikan dan omelan yang membuat penulis tergerak untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Sahabatku Aqmal dan Marsel dua orang kuat yang dapat membantu penulis dalam kondisi apapun, terimakasih telah menjadi tempat penulis bertukar pikiran dan berkeluh kesah, terimakasih juga sudah menjadi manusia yang tidak menghakimi kondisi dan keterbatasan penulis.
11. Kepada pak Putra salah satu langganan dibengkel tempat saya bekerja, terimakasih atas semua semangat, nasehat dan dukungan yang tidak henti hentinya diberikan setiap bertemu selalu membahas skripsi yang tidak kunjung usai, menjadi salah satu bara untuk penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman untuk Irfan, Jaka, Devis, Dion, Yazid, Risky, Rayhan, Aris, Bimo dan Puja yang selalu bisa menjadi tempat bertanya dan bertukar pikiran terkait penulisan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusinya kepada penulis selama perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
14. Kepada diri penulis pribadi, Adji Ansyori, Terimakasih telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai, sudah berjuang sampai titik ini, sudah bisa menjalani apapun hambatan yang ada, dan mohon maaf untuk keterlambatannya. Mungkin ini adalah awal dari segala semoga yang selalu diucapkan tiap doa, jadilah pribadi yang lebih baik kedepannya dan jangan pernah berhenti belajar terus gali ilmu dimanapun kamu berada.

Terima kasih, dan akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran , masukan, dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah berarti bagi penulis. Semoga segala bantuan, dukungan, do'a, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Penulis

Adji Ansyori

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kemiskinan	12
2.1.1 Konsep Dasar Kemiskinan.....	12
2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan	14
2.1.3 Ukuran Kemiskinan	14
2.2 Pendidikan.....	18
2.3 Pengeluaran Pemerintah.....	22
2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	22
2.3.2 Jenis pengeluaran pemerintah	23
2.3.3 Anggaran Bantuan Sosial.....	24
2.4 Pengangguran.....	25
2.4.1 Pengertian pengangguran	25
2.4.2 Jenis-jenis pengangguran	26
2.4.3 Tingkat Pengangguran terbuka	27
2.5 Penelitian Terdahulu	28
2.6 Kerangka Penelitian	32
2.7 Hipotesis	32

III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	34
3.3 Metode Analisis Data.....	36
3.4 Tahap Analisis	38
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5 Model Penelitian	40
3.5.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel	40
3.6 Pengujian Hipotesis Statistik	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Statistik Deskriptif	47
4.1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	48
4.1.2 Anggaran Bantuan Sosial (BS)	48
4.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	48
4.1.4 Persentase Penduduk Miskin (PM).....	49
4.2 Uji Signifikasi Model.....	49
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.1 Uji Normalitas.....	52
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	52
4.4 Hasil Estimasi Ordinary Least Square (OLS) Data Panel dengan Random Effect Model.....	53
4.5 Pengujian Hipotesis	55
4.5.1 Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual).....	55
4.5.2 Uji F	58
4.5.3 Koefisien Determinasi R ²	59
4.6 Hasil Dan Pembahasan	59
4.6.1 Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Miskin se-Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.....	59

4.6.2 Anggaran Bantuan Sosial Terhadap Persentase Penduduk Miskin se-Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.....	62
4.6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin se-Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022	64
V. SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 : Grafik Diagram batang persen penduduk miskin	4
Gambar 1.2 : Rata-rata Lama Sekolah Indonesia tahun 2010-2020	6
Gambar 1.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tahun 2010-2022	8
Gambar 2 .1 : Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 : Perbandingan Rata rata Lama Sekolah dan Persentase Penduduk Miskin di pulau Sumatera	60
Gambar 4.2 : Anggaran Bantuan Sosial di pulau Sumatera tahun 2018-2022	63
Gambar 4.3 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk miskin Pulau Sumatera 2018-2022	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Daftar Variabel	34
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	53
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada Random Effect	53
Tabel 4.8 Tabel Uji T	55
Tabel 4.9 Tabel Uji F	58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan yang makmur merupakan keinginan yang diimpikan oleh setiap orang, tanpa perlu khawatir dan merupakan keinginan setiap manusia, akan tetapi tidak semua orang dapat merasakan kesejahteraan hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dengan mengentaskan kemiskinan. Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat utama bagi pengurangan tingkat kemiskinan (E. Susanto et al., 2018).

Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, penduduk miskin mempunyai sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang rendah berarti produktifitas menjadi rendah sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam modal (Suripto & Subayil, 2020).

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang

dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya (Fithri & Kaluge, 2017).

Kemiskinan juga telah membatasi hak rakyat untuk (1) Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan spiritual dengan Tuhannya; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (kemendesa, 2007).

Menurut Bank Dunia dalam Wijayanto (2010), salah satu sebab kemiskinan yaitu karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Kemiskinan bisa juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin 3 tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Wijayanto, 2010).

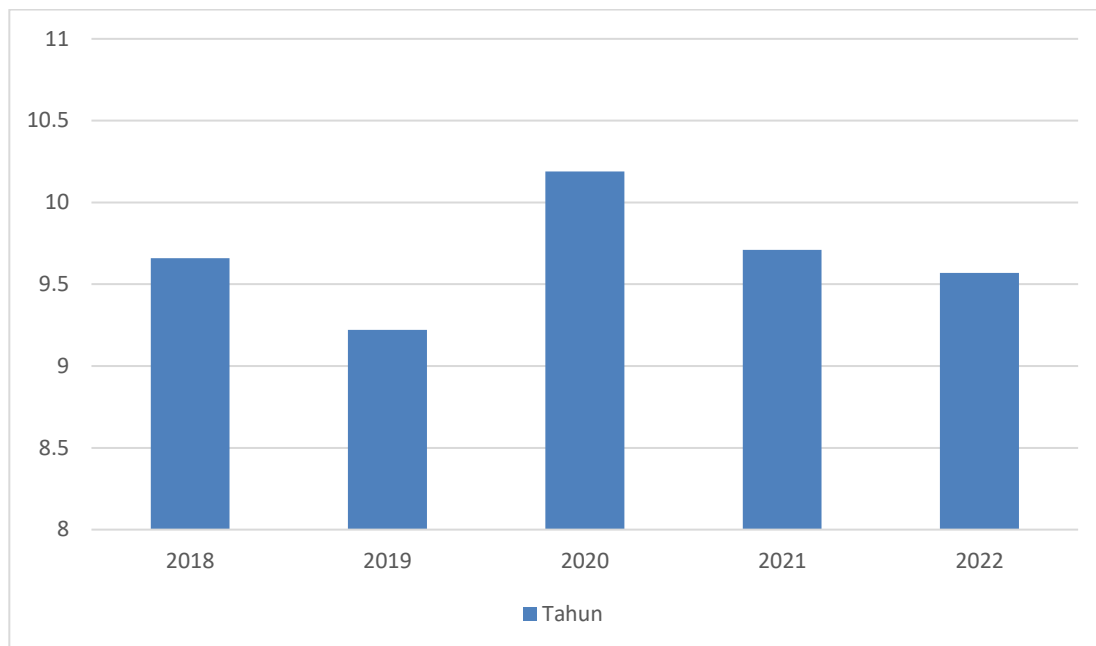
SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kumpulan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet kita, dan memastikan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang di dunia (Sampedro, 2021).

Salah satu dari 17 tujuan SDGs adalah "Tujuan 1: Tidak ada Kemiskinan", yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di seluruh dunia pada tahun 2030 dengan mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan akses yang setara bagi semua orang terhadap sumber daya dan layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, sanitasi, dan pekerjaan yang layak (Ansori, 2018).

Salah satu target SDGs adalah mengentaskan kemiskinan secara global. Tujuan ini dirumuskan pada target ke-1 yaitu "Tidak ada yang tertinggal: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia". Target ini memiliki beberapa indikator, seperti:

1. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
2. Meningkatkan perlindungan sosial bagi mereka yang berisiko terkena kemiskinan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan ekonomi bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Untuk mencapai target ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan juga organisasi internasional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (McInnes, 2018).



Sumber ; Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Gambar 1.1 : Grafik Diagram batang persen penduduk miskin

Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi tentang persen penduduk miskin yang mana selama 5 tahun kebelakang angka tertinggi adalah pada tahun 2020 yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 10,19% melonjaknya angka kemiskinan dikarenakan pandemic covid 19 yang mana membuat ekonomi nasional terpuruk karena terbatasnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat drastis yang awalnya setiap tahun mengalami penurunan pada tahun 2018 ke 2019 namun meningkat tajam di 2020, pada awalnya ditahun 2019 angka penduduk miskin menurut persen hanya 9,22% namun meningkat menjadi 10,19%.

Namun seperti yang kita lihat pada grafik diatas bahwa pasca pandemic ekonomi nasional perlahan membaik dan begitu pula dengan pengurangan populasi penduduk miskin yang berangsur dari tahun 2020 sampai 2022 membaik dan mengalami penurunan dalam persen penduduk miskin yang tadinya tahun 2020 mencapai 10,19% namun pada tahun 2021 menurun ke angka 9,71% dan kemudian menurun lagi ditahun 2022 menjadi 9,57%, melihat turunnya jumlah persen penduduk miskin tentunya pasti

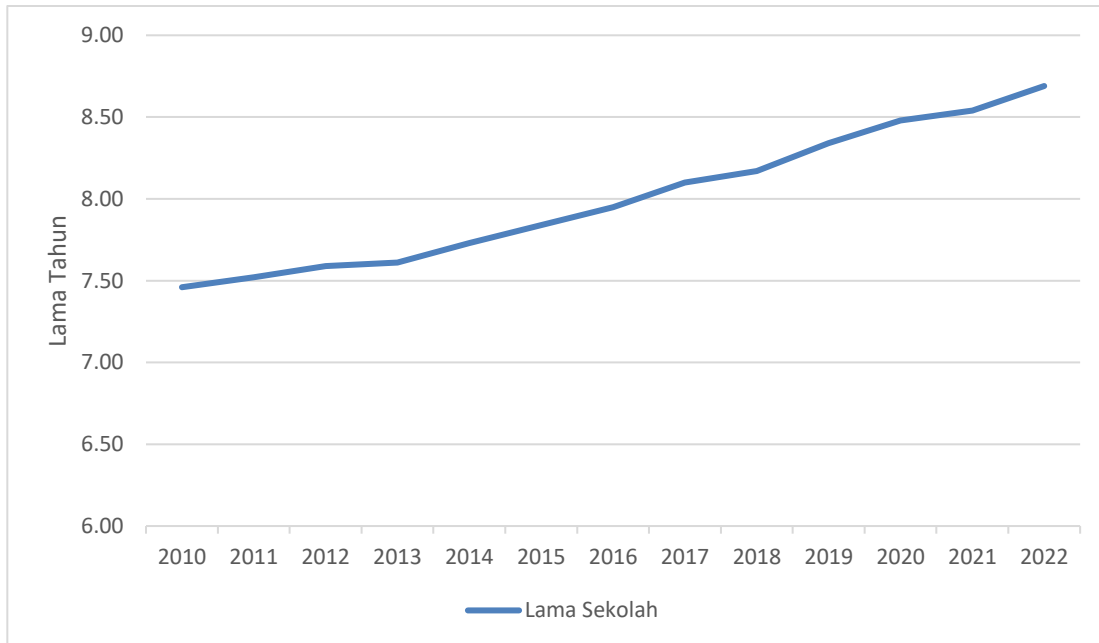
diiringi dengan pemulihan ekonomi yang membaik dengan bergeraknya Kembali kegiatan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan (Bps, 2023).

Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi (R. Susanto & Pangesti, 2019).

Menurut World Bank, lama pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan penghasilan individu dan mengurangi tingkat kemiskinan. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih baik, memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan mampu menghindari kemiskinan. Lama pendidikan yang lebih lama dapat mengurangi risiko kemiskinan. Dalam sebuah studi, World Bank menemukan bahwa setiap tahun tambahan dalam lama pendidikan seseorang dapat mengurangi risiko kemiskinan sebesar 9% pada negara-negara berkembang (Bank, 2019).

Rata-rata lama sekolah yang lebih lama juga dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Menurut BPS, pendapatan rata-rata orang yang berpendidikan S1 lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata orang yang hanya berpendidikan

SMA atau di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bersekolah, semakin tinggi kemungkinan mereka memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan (L. S. Rakasiwi, 2021).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.2 : Rata-rata Lama Sekolah Indonesia tahun 2010-2020

Dari data gambar diatas dapat dilihat bahwa rata rata lama Pendidikan di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang mana terlihat bahwa dalam 12 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan yang mana dari rata-rata lama sekolah yaitu 7,46 pada tahun 2010 dan terus meningkat hingga 8,69 pada tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dilihat dari rata-rata lama sekolah walaupun jika di perhatikan sangat kecil sekali perkembangannya.

Kemudian melihat dari data yang disajikan oleh bps dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Indonesia yaitu 8,69 tahun yang mana artinya, secara rata-rata, penduduk Indonesia telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP atau setara.

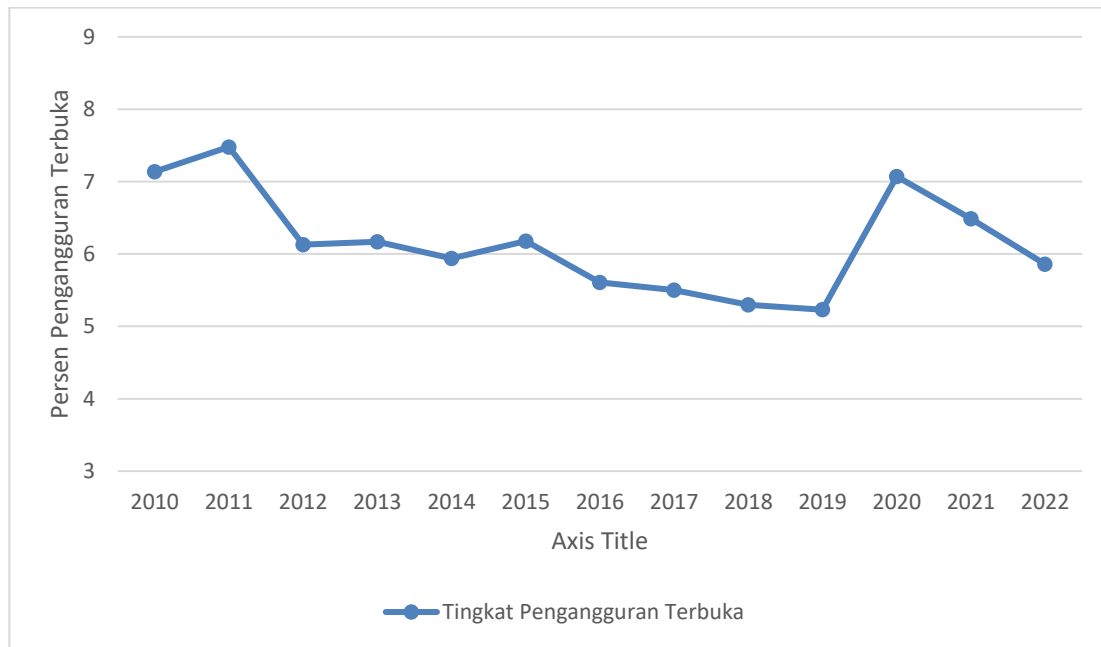
Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang lebih berkualitas masuk ke dalam negeri. pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Suripto & Subayil, 2020).

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Putut et al., 2021).

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yacoub, 2012)

Pengangguran terbuka adalah keadaan dimana seseorang yang mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan tersebut atau jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan. Hal ini dinyatakan oleh beberapa ahli seperti Samuelson dan Nordhaus serta Todaro. Namun, ada juga yang mengartikan pengangguran terbuka sebagai jumlah angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat pengangguran terbuka antara lain adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial (Todaro & Smith, 2015, Samuelson & Nordhaus 1998).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Gambar 1.3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tahun 2010-2022

Pada gambar yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka terus mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan namun jika diperhatikan tingkat pengangguran terbuka secara perlahan mengalami penurunan walaupun tidak secara drastis, dari tahun 2010 sampai sampai 2022 tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada tahun 2011 yang mana mencapai 7,48% namun ditahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu mencapai 6,13% yang mana pada tahun tahun berikutnya fluktuasi naik turunnya tingkat pengangguran cukup stabil.

Namun Ketika tingkat pengangguran terbuka paling rendah yaitu pada tahun 2019 di angka 5,23% pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup parah pada tahun 2020 hingga diangka 7,07% yang mana hal ini disebabkan oleh adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan phk masal sehingga melonjaknya tingkat pengangguran terbuka.

Saat ini perekonomian nasional menunjukkan trend yang fluktuatif yang mana karna pengaruh pandemic Covid-19 pertumbuhannya sempat mengalami penurunan yang mana pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya secara bertahap. Namun, perekonomian nasional sekarang sedang mengalami pemulihan pasca meredanya pandemic dan berangsur angsur membaik.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban terhadap persoalan kesejahteraan, akan tetapi tetap menjadi syarat keharusan dan kecukupan untuk mengurangi kemiskinan. Pengalaman dari beberapa Negara lain, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkadang masih meninggalkan beberapa permasalahan, yang mana diantaranya jumlah penduduk miskin yang relatif besar. Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, 2020).

Anggaran bantuan sosial merupakan alokasi dana dari pemerintah atau lembaga lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, dan kesehatan. Tujuan dari anggaran bantuan sosial adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, makanan, bahan bakar, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Anggaran bantuan sosial umumnya diprogramkan oleh pemerintah dalam rangkaian kebijakan sosial dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Mukhtaromin, 2024).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama pendidikan, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan maka peneliti tertarik menganalisis masalah ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ilmiah mengingat bahwa Sumatera adalah pulau dengan populasi penduduk terpadat kedua setelah pulau Jawa, semestinya memiliki potensi dengan kesejahteraan masyarakatnya baik dibidang Pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun, ironinya adalah bahwa tingkat kemiskinan di pulau Sumatera sangat tinggi dan bahkan banyak dari masyarakatnya yang berada dibawah garis kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah anggaran bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?
4. Bagaimanakah rata-rata lama sekolah, anggaran bantuan sosial, serta tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat rata-rata lama sekolah memberikan pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.
2. Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat anggaran bantuan sosial memberikan pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.
3. Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh terhadap jumlah persentase penduduk miskin.

4. Untuk mengetahui terkait dengan seberapa besar rata-rata lama sekolah, pengeluaran pemerintah, serta tingkat pengangguran memberikan pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai bagaimana pengaruh lama pendidikan, anggaran bantuan sosial, dan tingkat pengangguran terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.
2. Secara Praktis, sebagai tambahan referensi bagi peneliti sendiri untuk memperoleh gambaran karakteristik pendidikan, anggaran bantuan sosial, pengangguran, dan Jumlah persentase penduduk miskin serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Konsep Dasar Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan adalah kondisi atau keadaan seseorang atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan atau *poverty line*, yaitu suatu nilai atau batas pengeluaran minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jika pengeluaran seseorang atau rumah tangga di bawah garis kemiskinan, maka mereka dianggap sebagai miskin (Bps, 2021).

Kemiskinan merupakan permasalahan sentral dalam pembangunan nasional. Kemiskinan mempunyai tipologi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Padahal, permasalahan kemiskinan bukan sekedar permasalahan ekonomi saja, namun juga merupakan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Karena pengertian kemiskinan bersifat relatif, maka kemiskinan dipahami dan dikategorikan sebagai kemiskinan yang berdimensi ekonomi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mempunyai dimensi sosiokultural yang disebut kemiskinan budaya, dan kemiskinan mempunyai dimensi struktural yang disebut kemiskinan struktural. Perjuangan melawan kemiskinan tidak selalu mempunyai dimensi ekonomi. Peran, fungsi struktural, kapasitas sistem politik, dan pendekatan partisipatif dibahas di bawah ini. Yang penting adalah bagaimana pemangku kepentingan memandang fungsi dan perannya masing-masing (Lubis, 2010).

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan non-dasar yang lainnya. Definisi ini juga mencakup dimensi multidimensional dari kemiskinan, sehingga mencakup tidak hanya aspek finansial

tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan (Ardi Adji Taufik Hidayat Hendratno Tuhiman Sandra Kurniawati Achmad Maulana, 2020).

Amartya Sen menggambarkan kemiskinan sebagai kekurangan kebebasan untuk hidup sesuai dengan kemampuan individu dan akses terhadap sumber daya dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, air bersih, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pendekatan kebebasan Amartya Sen menempatkan individu di pusat analisis kemiskinan dan menekankan pentingnya menganalisis kemiskinan dari perspektif kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Menurut Amartya Sen, kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan rendah tetapi juga tentang kurangnya kesempatan dan kebebasan yang menghalangi akses seseorang terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus difokuskan pada peningkatan akses sumber daya dan kesempatan individu untuk mencapai potensi penuh mereka (Sen, 1999).

Menurut pandangan Keynes, subsidi atau belanja sosial dari pemerintah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut mampu memperkuat daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga konsumsi masyarakat secara keseluruhan ikut naik. Peningkatan konsumsi inilah yang akan memperbesar permintaan efektif, lalu mendorong aktivitas produksi dan membuka lapangan kerja baru. Saat kesempatan kerja bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat, tingkat kemiskinan pun dapat berkurang. Dengan demikian, subsidi pemerintah tidak hanya sekadar alat untuk membagi ulang pendapatan, tetapi juga menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi serta pengurangan ketimpangan sosial (Multiplier, 1936).

Pengurangan kemiskinan dalam konteks ini mengacu pada pendekatan yang lebih luas, yaitu pengurangan kemiskinan secara umum. Hal ini berarti bahwa kemiskinan yang dibahas tidak terbatas pada aspek pendapatan semata, tetapi mencakup dimensi-dimensi lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi tersebut meliputi akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang

memadai, ketersediaan air bersih, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan pendekatan pengurangan kemiskinan yang bersifat multidimensi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang diusulkan oleh Panel Tingkat Tinggi PBB. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, diperlukan perhatian pada berbagai aspek yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat (Liu et al., 2015).

2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan

- a. Kemiskinan absolut: jenis kemiskinan yang paling umum dikenal, di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak (Muliza, 2022).
- b. Kemiskinan relatif: jenis kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih hidup di bawah garis kemiskinan relatif dalam suatu masyarakat (Kurnianingsih, 2012).
- c. Kemiskinan siklis: jenis kemiskinan di mana kemiskinan terus-menerus terjadi dalam suatu keluarga atau komunitas, dan cenderung diturunkan dari generasi ke generasi (Susilowati, 2016).
- d. Kemiskinan struktural: jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan sistemik dalam masyarakat, seperti diskriminasi rasial atau gender, atau ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi (Pratiwi et al., 2022).

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan pusat statistik (2023) untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini terkait dengan *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-gizi yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk tergolong miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^a$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Kemudian ada indikator lain yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah salah satu metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk mengukur kemiskinan. P1 mengukur rata-rata jarak antara pendapatan orang atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri.

P1 dihitung dengan menghitung rata-rata selisih antara pengeluaran rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan garis kemiskinan itu sendiri, kemudian hasilnya dikuadratkan. Semakin besar nilai P1, semakin dalam kemiskinan yang dialami oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan juga

dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan, selain mengurangi angka kemiskinan, penting juga untuk memperhatikan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Karena itu, P1 menjadi salah satu indikator yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Kemudian ada juga indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk mengukur kemiskinan. Indeks ini mengukur seberapa parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

P2 dihitung dengan menghitung rata-rata kuadrat perbedaan antara pengeluaran rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri. Semakin besar nilai P2, semakin parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dan juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan, selain mengurangi angka kemiskinan, penting juga untuk memperhatikan seberapa parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Karena itu, P2 menjadi salah satu indikator yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan sering digunakan garis kemiskinan (*poverty line*) Garis Kemiskinan atau *Poverty Line* menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang atau rumah tangga dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah atau populasi.

BPS menghitung garis kemiskinan menggunakan pengeluaran minimum hidup layak (PMHL) yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. PMHL dihitung berdasarkan data pengeluaran rumah tangga di seluruh Indonesia dan diperbarui setiap tahun.

Untuk menghitung persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk miskin (P_0) = $(\text{Jumlah Penduduk Miskin} / \text{Total Penduduk}) \times 100\%$. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah ambang batas garis kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 502.730 per kapita per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 464.474 per kapita per bulan untuk daerah perdesaan. Artinya, jika pengeluaran seseorang atau rumah tangga di bawah garis kemiskinan tersebut, maka orang atau rumah tangga tersebut dianggap miskin (Bps, 2023).

2.2 Pendidikan

Menurut UUD (Undang-Undang Dasar) Indonesia memberikan dasar hukum bagi sistem pendidikan di Indonesia. Dalam UUD, pendidikan diatur dalam Pasal 31 yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa negara harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai kemajuan yang adil dan Makmur (Jusnita nina, 2017).

Selain Pasal 31, UUD juga mengatur tentang pendidikan dalam Pasal 32, yang menyatakan bahwa negara mengatur dan mengelola sistem pendidikan nasional secara terpadu dan merata serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem pendidikan di Indonesia sendiri diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta

didik, serta peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal (taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi), nonformal, dan informal. Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum dan standar kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Pemerintah juga berperan dalam memberikan akses pendidikan yang merata, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya (Soedibyo, 2003).

Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) menekankan pentingnya pengetahuan dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan, mengembangkan, dan memanfaatkan pengetahuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Kliwan, 2006).

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi. Pendidikan juga dapat memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan dalam era ekonomi global saat ini (Ambarwati et al., 2022).

Selain itu, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan pengetahuan dan inovasi. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan penelitian dan pengembangan di lembaga Pendidikan (Ilham et al., 2023).

Dalam konteks teori pertumbuhan baru, pendidikan juga dapat berperan dalam mengembangkan kapasitas untuk memahami dan menerapkan pengetahuan teknologi. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan dapat diarahkan untuk memberikan penekanan

pada keterampilan teknologi yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Asngari, 2019).

Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menciptakan dan menerapkan inovasi dalam ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Teori *Human Capital* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan suatu investasi dalam sumber daya manusia, yang dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom Theodore W. Schultz pada tahun 1960 dalam artikelnya yang berjudul "*Investment in Human Capital*" (Nurkholis, 2016).

Menurut teori *Human Capital*, pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, sehingga mereka menjadi lebih produktif dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, investasi dalam sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Atmanti, 2005).

Teori *Human Capital* juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang sama ke pendidikan dan pelatihan, individu dari latar belakang yang kurang mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka (Subroto, 2014).

Selain itu, teori *Human Capital* juga menganggap bahwa investasi dalam sumber daya manusia dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup individu (Aksari, 2024).

Teori *Human Capital* terus berkembang pesat dan diperkaya oleh banyak ahli ekonomi. Beberapa di antaranya adalah Theodore Breton Rocha, David Finegold, serta Richard Freeman. Theodore Breton Rocha mengajukan pendekatan baru dalam pengukuran modal manusia dengan memasukkan variabel seperti keterampilan teknologi informasi atau bahasa asing sebagai bagian dari investasi pada pendidikan dan pelatihan. David Finegold menyoroti pentingnya sistem pendidikan yang berfokus pada keterampilan teknis dan sosial untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam era globalisasi. Sementara itu, Richard Freeman mengembangkan konsep pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial individu (Ross, 2023) (Soemantri, 2017) (Breton, 2018).

Dalam praktiknya, teori *Human Capital* telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk kebijakan pendidikan dan pelatihan di banyak negara. Sebagai contoh, program pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh pemerintah dapat dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia, yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Indikator keadaan pendidikan penduduk dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS): APS mengukur jumlah siswa yang terdaftar di sebuah jenjang pendidikan tertentu dalam suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang tersebut di wilayah yang sama. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kesempatan penduduk untuk mengakses pendidikan.
2. Angka Melek Huruf (AMH): AMH mengukur persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis dalam bahasa tertentu, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat literasi penduduk.
3. Tingkat Partisipasi Pendidikan Nonformal: Indikator ini mengukur persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pendidikan nonformal, seperti kursus,

pelatihan, dan program pengembangan keterampilan. Indikator ini dapat memberikan gambaran seberapa besar minat penduduk untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka.

4. **Tingkat Pendidikan dan Kualifikasi:** Indikator ini mengukur tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk, serta kualifikasi atau sertifikasi yang mereka miliki. Indikator ini dapat memberikan gambaran seberapa besar keterampilan dan kemampuan penduduk dalam memasuki dunia kerja.
5. **Pengeluaran Pendidikan:** Indikator ini mengukur jumlah pengeluaran yang dihabiskan oleh individu, keluarga, atau pemerintah untuk pendidikan, baik itu dalam bentuk biaya sekolah, buku, atau kegiatan pendidikan lainnya. Indikator ini dapat memberikan gambaran seberapa besar prioritas pendidikan dalam anggaran individu atau negara.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan pendidikan penduduk di suatu wilayah atau negara. Dalam hal ini, penggunaan beberapa indikator tersebut secara bersama-sama dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai keadaan pendidikan penduduk (Faradiba & Nomleni, 2024).

2.3 Pengeluaran Pemerintah

2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah dapat terdiri dari berbagai macam pos, termasuk belanja modal (pembangunan infrastruktur), belanja operasional (gaji pegawai, pemeliharaan gedung, dsb), dan transfer pembayaran (bantuan keuangan untuk kelompok masyarakat tertentu, subsidi harga, dsb) (Faradiba & Nomleni, 2024).

Pengeluaran pemerintah biasanya dibiayai melalui penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan penerimaan hibah dari lembaga dalam maupun luar negeri. Tujuan utama

dari pengeluaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian negara (Dirjen Anggaran, 2017).

Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi di mana ekonomi mengalami resesi atau perlambatan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dukungan bagi sektor-sektor tertentu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

2.3.2 Jenis pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Beberapa jenis pengeluaran pemerintah yang umum adalah sebagai berikut:

- a. Belanja modal (*capital expenditure*): Pengeluaran untuk investasi jangka panjang dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, gedung-gedung pemerintah, dan fasilitas lainnya. Belanja modal ini bertujuan untuk memperluas kapasitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Belanja operasional (*operating expenditure*): Pengeluaran rutin untuk menjalankan operasi pemerintah, seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, transportasi, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan publik. Belanja operasional ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pemerintah dan menjalankan program-program pemerintah.
- c. Transfer pembayaran (*transfer payments*): Pengeluaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti bantuan sosial, tunjangan pensiun, subsidi harga, dan dana bantuan untuk proyek-proyek khusus. Transfer pembayaran ini bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Pembayaran bunga dan utang (*debt servicing*): Pengeluaran untuk membayar bunga dan utang pemerintah yang telah diambil dari pinjaman atau obligasi.

Pembayaran bunga dan utang ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah.

- e. Belanja non-rutin (*non-routine expenditure*): Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi situasi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam, pandemi, atau konflik. Belanja non-rutin ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat dan memulihkan kondisi ekonomi negara (Kemetrian Keuangan, 2011).

2.3.3 Anggaran Bantuan Sosial

Program bantuan tunai telah menjadi salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang populer secara global sejak diperkenalkannya Program Progres di Meksiko pada tahun 1998. Popularitas ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa program bantuan tunai efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan akses dan capaian pendidikan, serta memperbaiki status kesehatan masyarakat miskin (Muamil, 2021).

Anggaran bantuan sosial dapat menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer pembayaran kepada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan, seperti program bantuan sosial untuk masyarakat miskin atau terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial (Mandasari et al., 2022).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai program dan insentif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) (Apriliana Sukmawati et al., 2022).

Pengalokasian anggaran bantuan sosial dapat menjadi perhatian penting dalam perencanaan anggaran pemerintah karena dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting juga untuk memastikan

bahwa program bantuan sosial efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga bantuan tersebut dapat benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan (kemetrian keuangan, 2011).

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, serta memastikan bahwa dana bantuan sosial yang dialokasikan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan program bantuan sosial dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya (Kementrian Keuangan, 2020).

2.4 Pengangguran

2.4.1 Pengertian pengangguran

Menurut Keynes (1936), pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keynes memandang pengangguran sebagai masalah yang terjadi karena kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa (Faisah, 2013).

Menurut Pigou (1933), pengangguran terjadi ketika tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja lebih tinggi daripada tingkat upah pasar. Pigou mengatakan bahwa pengangguran dapat diatasi dengan menurunkan upah atau dengan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa (Yanti et al., 2020).

Menurut Friedman (1968), pengangguran terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Friedman mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi pengangguran adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar (Nabila & Rozaini, 2022).

2.4.2 Jenis-jenis pengangguran

Berikut ini adalah beberapa jenis pengangguran yang umum dikenal:

1. Pengangguran friksional: Pengangguran ini terjadi ketika seseorang mencari pekerjaan baru atau pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Pengangguran friksional merupakan hal yang normal dan wajar terjadi dalam suatu perekonomian.
2. Pengangguran struktural: Pengangguran struktural terjadi ketika tuntutan pasar kerja berubah dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini dapat disebabkan oleh perubahan teknologi, pergeseran tren industri, atau perubahan struktur ekonomi suatu negara.
3. Pengangguran siklikal: Pengangguran siklikal terjadi karena adanya fluktuasi dalam siklus bisnis, seperti resesi atau depresi. Ini dapat disebabkan oleh berkurangnya permintaan konsumen, ketidakstabilan politik, atau perubahan dalam kebijakan moneter.
4. Pengangguran musiman: Pengangguran musiman terjadi ketika sebagian besar pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu dalam satu tahun. Contohnya, pekerjaan di sektor pariwisata, pertanian, atau kehutanan.
5. Pengangguran terselubung: Pengangguran terselubung terjadi ketika orang yang ingin bekerja, tetapi tidak tercatat sebagai pengangguran dalam data statistik resmi karena mereka tidak mencari pekerjaan secara aktif atau tidak terdaftar di lembaga pencari kerja.

Semua jenis pengangguran di atas dapat memiliki dampak yang berbeda pada perekonomian dan memerlukan penanganan yang berbeda pula dari pemerintah atau lembaga yang terkait (Sejati, 2020) (E. G. Rakasiwi, 2019).

2.4.3 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengertian tingkat pengangguran terbuka atau open unemployment rate adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan secara aktif (Marini & Putri, 2020).

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membagi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk bekerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan atau yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan (Tumilar et al., 2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah penganggur dibandingkan dengan total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun mencari kerja, sedangkan penganggur adalah mereka yang belum bekerja namun aktif mencari pekerjaan atau siap untuk bekerja. Perhitungan menggunakan rumus $TPT = (\text{jumlah penganggur} \div \text{jumlah angkatan kerja}) \times 100\%$ (Ardian et al., 2022).

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya masalah di perekonomian suatu negara, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja, atau ketidakstabilan politik. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka yang rendah dapat menunjukkan keadaan yang lebih stabil dan sehat dalam perekonomian (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

David Ricardo (1821) menyatakan bahwa pengangguran terbuka terjadi ketika upah pekerja lebih tinggi daripada tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup. Namun John Maynard Keynes (1936) mengatakan bahwa pengangguran terbuka dapat terjadi karena kurangnya permintaan agregat di pasar kerja. Milton Friedman (1968) menyatakan bahwa pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dalam mengatur pasar kerja. Gary Becker (1975) mengatakan

bahwa pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pendidikan pekerja, yang membuat mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Wardiansyah et al., 2017).

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mempelajari beberapa penelitian yang berkaitan dan relevan dengan topik yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ditulis dalam table ringkasan berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian		Peneliti	Alat Analisis		Hasil Penelitian
Investasi Modal Manusia	Bidang Pendidikan: Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi	Novi yanti, Nurtati, Misharni (2020)	Analisis Data Penelitian Menggunakan Resresi Data Panel		Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat pengaruh negatif antara pengangguran dengan investasi modal manusia dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat		Muhammad Ilham Wali, Arvina Ratih Yulihar Taher, Heru Wahyudi, Asih	Penelitian ini menggunakan model asumsi klasik dengan data panel dari tahun 2016-2020 di 10 provinsi		Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan

Judul Penelitian	Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Pengangguran Terbuka Terhadap Keparahan Kemiskinan	Murwiati (2022)	Sumatera menggunakan model FEM (Fixed Effect Model).	tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera.
Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan	Edyson Susanto, Eny Rochaida, Yana Ulfah (2018)	Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan Analisis Jalur	Pendidikan berpengaruh langsung terhadap Pengangguran di Kota Samarinda, meningkatnya penduduk yang tamat SMA dari tahun ke tahun namun lapangan pekerjaan semakin sulit di peroleh sehingga penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SMA sederajat semakin bersaing ketat dalam

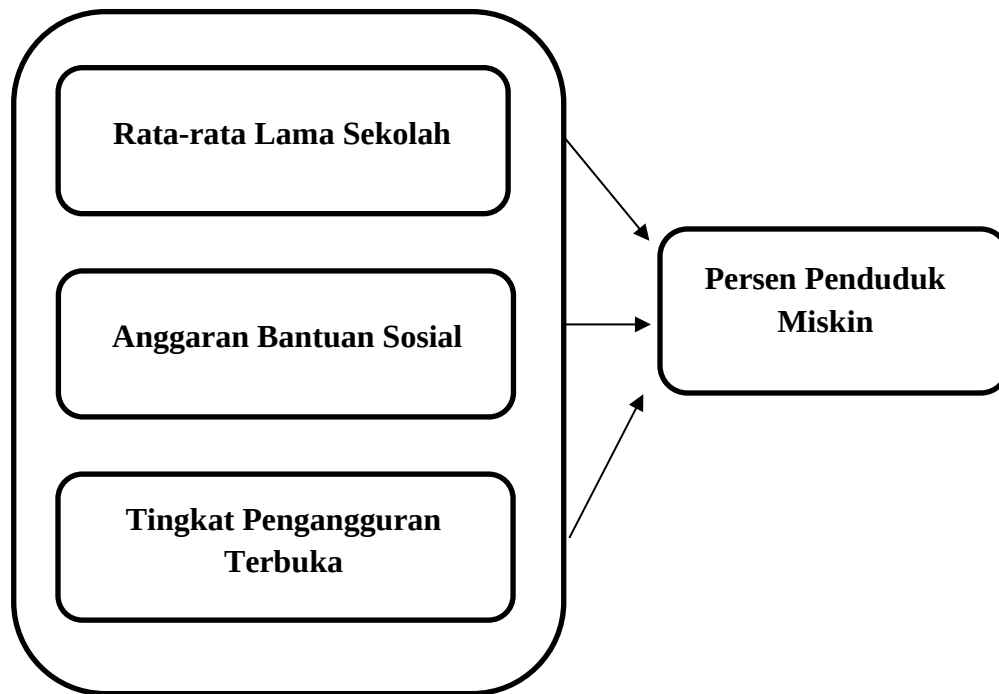
Judul Penelitian	Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda	LIU Qian-Qian, YU Man, WANG Xiao-Lin	Artikel ini mengkaji tujuan pengurangan kemiskinan dalam kerangka Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)	memperoleh pekerjaan Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah China harus memberikan prioritas tertinggi untuk mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan, karena pengurangan kemiskinan merupakan kekuatan lunak China
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017	Suripto, Subayil (2020)	Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan model efek tetap	Hasil dalam penelitian dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (2) variabel

Judul Penelitian	Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan; (3) Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; (4) Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada variabel baru yaitu anggaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin. Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan dan membahas variabel anggaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin dengan topik yang sama, variabel anggaran bantuan sosial dan persen penduduk miskin ini merupakan total dari seluruh provinsi yang ada di pulau sumatera per tahun. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode data yang telah diperbaharui dengan data terbaru sejak tahun 2018 sampai dengan bulan tahun 2022.

2.6 Kerangka Penelitian

Salah satu aspek yang mempengaruhi persen penduduk miskin ialah Rata-rata Lama Sekolah. Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan (Ustama, 2009).



Sumber : Dikembangkan Oleh Peneliti

Gambar 2 .1 : Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian melalui data yang terkumpul, maka dilakukan uji hipotesis dimana:

- Diduga Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.
- Diduga Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh Positif terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.

- c. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh Positif terhadap Produk Persentase Penduduk Miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.
- d. Diduga Rata-rata Lama Sekolah, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap Persentase penduduk miskin di Provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan data, sumber data menjadi hal penting dalam menentukan teknik pengumpulan data. Ada dua macam sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sekunder data panel yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS) dan dinas instansi yang terkait.

Tabel 3.1 Daftar Variabel

Variabel		Simbol	Satuan	Sumber Data	
1.	Persentase Penduduk Miskin	PM	Persen (%)	Badan Statistik (BPS)	Pusat
2.	Rata-rata Lama Sekolah	RLS	Tahun	Badan Statistik (BPS)	Pusat
3.	Anggaran Bantuan Sosial	logBS	Milyar	DJPK Kemenkeu	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen (%)	Badan Statistik (BPS)	Pusat

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah deskripsi atau spesifikasi yang jelas dan rinci tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dioperasionalkan dalam suatu penelitian. Definisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel tersebut dapat diukur secara konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu *dependent variabel* dan *independent variabel*.

1) *Dependent Variabel*

Dependent variabel pada penelitian ini adalah persentase penduduk Miskin, persentase penduduk miskin didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk di suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan). Data ini diukur dalam persen (%) dan diperoleh dari data resmi badan statistik nasional.

2) *Independent Variabel*

Dalam penelitian ini *Independent Variabel* yang digunakan ialah:

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk suatu wilayah yang mana pada kasus ini merupakan penduduk wilayah pulau sumatera untuk mengikuti pendidikan formal, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Variabel ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang dicapai oleh populasi dan diukur dalam satuan tahun.

b. Anggaran Bantuan Sosial (BS)

Anggaran bantuan sosial adalah jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan program kesejahteraan lainnya. Variabel ini mengukur sejauh mana pemerintah berinvestasi dalam mendukung kesejahteraan sosial warganya dan diukur dalam satuan milyar rupiah. Transformasi log pada data anggaran bantuan sosial bertujuan untuk mengatasi distribusi data yang tidak normal, mengurangi variasi ekstrem, dan menciptakan hubungan yang lebih linear dengan indikator sosial seperti kemiskinan. Selain itu, transformasi ini menyederhanakan analisis data besar dan meningkatkan akurasi hasil statistik dengan memenuhi asumsi model yang diperlukan (Alfath et al., 2025);(Ohyver, 2013).

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merujuk pada persentase penduduk yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup penduduk yang tidak bekerja sama sekali meskipun mereka mampu dan berusaha mencari pekerjaan. Variabel ini memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja dan diukur dalam satuan persen.

3) Batasan Penelitian

Batasan Penelitian adalah keterbatasan atau hambatan yang diakui oleh peneliti yang bisa mempengaruhi hasil dan interpretasi penelitian. Batasan ini menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada konteks lain. Batasan penelitian ini mencakup rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2022 dan fokus eksklusif pada provinsi-provinsi di Sumatera, sehingga hanya berfokus diprovinsi sumatera saja sehingga generalisasi terhadap wilayah lain di Indonesia mungkin terbatas dalam konteks sosial-ekonomi, dengan menggunakan pendekatan data sekunder dan analisis statistik untuk mengidentifikasi pengaruh rata-rata lama sekolah, anggaran bantuan sosial, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap persentase penduduk miskin.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode panel data, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat bantu analisis yaitu Stata. Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section* (Widardjono, 2018). Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa Provinsi di Indonesia. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel penelitian terdiri dari 10 Provinsi di Sumatera (*cross section*) namun dalam berbagai periode waktu (*time series*).

Data yang seperti inilah yang disebut dengan data panel. Dalam analisis model data panel dikenal tiga pendekatan yang terdiri dari *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan menggunakan data *time series* ataupun *cross section* sebagai berikut:

1. Panel data memiliki heterogenitas yang lebih tinggi. Hal ini karena data tersebut melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu.
2. Data panel dapat mengestimasi karakteristik untuk tiap individu berdasarkan heterogenitasnya.
3. Panel data mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinieritas yang rendah, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien.
4. Panel data cocok untuk studi perubahan dinamis, karena panel data pada dasarnya adalah data *cross section* yang diulang-ulang.
5. Panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data *time series* murni atau data *cross section* murni.
6. Panel data mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Penggunaan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda setiap individu dan periode waktu (Widardjono, 2018). Oleh karena itu bergantung asumsi yang dibuat tentang *intersep*, koefisien slope dan *error term*.

Ada beberapa kemungkinan asumsi yang muncul antara lain:

- a. Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu.
- b. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu.
- c. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar waktu.
- d. Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu.
- e. Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.

3.4 Tahap Analisis

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui kenormalan *error term* dan variabel variabel (independen dan dependen variabel), apakah data sudah tersebar secara normal ataukah belum. Regresi linear normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan residual memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera *Test* (JB-*Test*) dan metode grafik. Dalam metode J-B *Test*, yang dilakukan adalah menghitung nilai *skewness* dan *kurtosis* (Gujarati, 2010).

Hipotesis:

H₀ : data tersebar normal

H_a : data tidak tersebar normal

Kriteria Pengujian:

H₀ ditolak dan H_a diterima, jika $J-B > \text{Chi-Square}$

H₀ diterima dan H_a ditolak, jika $J-B < \text{Chi-Square}$

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Besaran nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya (atau data sebelumnya). Contohnya untuk kasus jenis data *time series* data saham tahun ini sangat tergantung dari data saham tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang disebut dengan autokorelasi. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika tergejala autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji *Durbin Watson* (DW *Test*), uji *Langrage Multiplier* (LM *Test*), uji statistik Q, dan *Run Test*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varians (homoskedastisitas) yang tidak konstan, yaitu varians error bernilai sama untuk setiap kombinasi tetap dari $X_1, X_2, \dots, X_p$. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adanya heteroskedastisitas ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i) = \sigma^2 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Metode White dengan hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_a : Nilai Prob $< \alpha$ (0,05) = Terjadi gejala Heteroskedastisitas

H_0 : Nilai Prob $> \alpha$ (0,05) = Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

d. Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2004), multikolinearitas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya masalah korelasi yang sempurna antar variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini diuji melalui nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya (Ghozali, 2001). Dalam pengertian sederhana, setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan di regresikan terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Menurut Ghozali (2001), nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 maka disimpulkan terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.5 Model Penelitian

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Regresi Berganda

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 \log ABS_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \mu$$

Dimana:

PM_{it} = Penduduk Miskin (%)

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Konstanta

RLS_{it} = Rata-rata Lama sekolah (Tahun)

ABS_{it} = Anggaran Bantuan Sosial (Rupiah)

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

μ = *error term*

3.5.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari tiga metode perhitungan, yaitu metode *Pooled Least Square* (PLS), metode *Fixed Effect* (FEM), dan metode *Random Effect* (REM). Ketiga metode sangat berbeda satu sama lain, berikut penjelasan masing - masing metode:

a. Metode *Pooled Least Square* (PLS)

Estimasi metode PLS merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam pegujian data panel yaitu hanya mengombinasikan data *cross section* dan *time series*. Pengujian menggunakan OLS biasa dengan tidak memperhatikan dimensi individu (*cross section*) dan waktu (*time series*). Berikut model regresi metode PLS.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_0 = Koefisien intersep yang merupakan scalar

β_1, β_2 = Koefisien slope atau kemiringan

Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-I dan waktu ke-t

$X1_{it}, X2_{it}$ = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

b. Metode *Fixed Effect* (FEM)

Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep antar *cross section* adalah berbeda namun slopenya tetap sama. Teknik estimasi data panel dengan metode FEM menggunakan variabel *dummy* (variabel boneka) yang memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Fungsi *dummy* yaitu untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar *cross section*. Permodelan ini lebih dikenal dengan teknik *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Persamaan LSDV dapat ditulis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 D1_{it} + \beta_4 D4_{it} + \beta_n Dn_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana:

β_0 = Koefisien intersep yang merupakan scalar

$\beta_1, \beta_2 \dots \beta_n$ = Koefisien slope atau kemiringan

Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X1_{it}, X2_{it} \dots Xn_{it}$ = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

$D1, D2 \dots Dn$ = 1 untuk *cross section* yang berpengaruh dan 0 untuk *cross section* yang tidak berpengaruh.

c. Metode *Random Effect* (REM)

Metode REM menggunakan pendekatan variabel gangguan (*error term*) untuk mengetahui hubungan antar *cross section* dan *time series*. Cara ini cenderung melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Permodelan sebelumnya yaitu FEM dengan tambahan variabel *dummy* dapat mengurangi banyaknya *degree of freedom* yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Sehingga metode REM hadir dengan menyempurnakan model FEM. Pembentukan model REM sebagai berikut: $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \mu_{it}$ Dengan memperlakukan β_0 sebagai fixed, kita mengasumsikan bahwa konstanta adalah variabel acak

dengan nilai rata-rata β . Dan nilai konstanta untuk masing-masing unit cross-section dapat dituliskan sebagai: $\beta_0 + \epsilon_i$ $i = 1, 2, \dots, N$ dimana ϵ_i adalah *random error term* dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi adalah σ^2 (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan mereka memiliki nilai rata-rata yang sama untuk *intercept* (β_0) dan perbedaan individual dalam nilai *intercept* setiap individu akan direfleksikan dalam *error term* (μ_i).

Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it}$$

dimana:

$$w_{it} = \epsilon_i + \mu_{it}$$

Error term kini adalah w_{it} yang terdiri dari ϵ_i dan μ_{it} . ϵ_i adalah *cross section (random) error component*, sedangkan μ_{it} adalah *combined error component*.

Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut *error components model* (ECM). Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* adalah (Gujarati & Porter, 2008).

- Bila T (banyaknya unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah *unit cross section*) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda, sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu *fixed effect model*.
- Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Apabila diyakini bahwa *unit cross section* yang dipilih dalam penelitian diambil secara acak, maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya apabila diyakini bahwa *unit cross section* yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak, maka harus menggunakan *fixed effect*.
- Apabila komponen *error* individual (ϵ_i) berkorelasi dengan variabel bebas X , maka parameter yang diperoleh dengan *random effect* akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan *fixed effect* tidak bias.

- Apabila N besar dan T kecil, kemudian apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

d. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel yang terdiri dari 3 macam metode yaitu *Common Effect* (PLS), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Tentu dalam pengujian diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat dua cara pengujian yang umum digunakan yaitu uji Chow dan uji Hausman.

1) Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model pendekatan yang paling baik antara *common effect* dan *fixed effect* dengan melihat nilai distribusi F statistik. Apabila nilai probabilitas distribusi F statistik lebih dari nilai tingkat signifikansi yang ditentukan maka model yang digunakan adalah *common effect* dan jika nilai probabilitas distribusi F statistik kurang dari tingkat signifikansi maka model yang digunakan adalah *fixed effect approach* (Widarjono, 2018).

Adapun hipotesis dari pengujian ini restricted F-Test yaitu:

H_0 : Model PLS (*restricted*)

H_a : *Fixed Effect Model (unrestricted)*

2) Uji Hausman

Pengujian Hausman untuk memilih model FEM atau REM dalam estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel bebas. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya ketika

gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*

3) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan common effect atau random effect.⁶⁶ Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Model common effect

H₁ : Model random effect

Uji LM ini didasarkan pada probability Breusch-Pagan, jika nilai probability Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha maka H₀ ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model random effect dan sebaliknya.

3.6 Pengujian Hipotesis Statistik

Menurut Gujarati (2010), parameter-parameter yang akan diestimasi dapat dilihat berdasarkan penilaian statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (Uji - t), uji signifikansi parameter secara serempak (Uji – F) pada $\alpha = 5\%$.

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat pada $\alpha = 5\%$ dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Dalam hal ini akan membandingkan nilai antara t-hitung dengan t-tabel.

- Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H₀ ditolak dan menerima H_a, yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H₀ diterima dan menolak H_a, yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah:

Rata-rata Lama Sekolah

H₀ : $\beta_1 = 0$ Nilai Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap Persen Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.

$H_a : \beta_1 < 0$ Nilai Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Persen Penduduk Miskin pada provinsi di Sumatera.

Anggaran Bantuan Sosial

$H_0 : \beta_2 = 0$ Nilai Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Persen Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.

$H_a : \beta_2 < 0$ Nilai Anggaran Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persen Penduduk Miskin pada provinsi di Sumatera.

Tingkat Pengangguran Terbuka

$H_0 : \beta_1 = 0$ Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Persen Penduduk Miskin pada Provinsi Sumatera.

$H_a : \beta_1 < 0$ Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Persen Penduduk Miskin pada Provinsi di Sumatera.

b. Uji F Statistik

Pengujian secara menyeluruh dilakukan melalui uji statistik f (uji signifikansi simultan). Uji F digunakan untuk uji signifikansi model. Uji F bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Untuk menguji apakah koefisien regresi β_1 , β_2 , dan β_3 secara bersama-sama atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen pada $\alpha = 5\%$, prosedur uji F dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:
 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ (Lama Pendidikan, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka bersama-sama tidak berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan pada Provinsi di Sumatera).
 $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots = \beta_k \neq 0$ dimana k 1,2,3, , k (Lama Pendidikan, Anggaran Bantuan Sosial, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan pada Provinsi di Sumatera).
- Membandingkan F-hitung
 Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi dengan menggunakan konsep koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai 1. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. R^2 merupakan koefisien determinasi yang tidak disesuaikan. Maka selanjutnya dilihat koefisien determinasi yang disesuaikan. Dalam hal ini disebut *adjusted R*.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara persentase penduduk miskin di provinsi se-Sumatera tahun 2018-2022 dengan rata-rata lama sekolah, anggaran bantuan sosial, dan tingkat pengangguran terbuka, serta mengidentifikasi pentingnya pendidikan dalam mengontrol peningkatan dan penurunan persentase penduduk miskin. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model, ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin, menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin rendah persentase penduduk miskin. Anggaran bantuan sosial, di sisi lain, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin, mengindikasikan bahwa perlu adanya komponen tambahan agar anggaran bantuan sosial dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin, artinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dapat menekan tingkat pengangguran terbuka dan secara efektif mengurangi kemiskinan di provinsi se-Sumatera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Pemerintah daerah di Sumatera perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Program pendidikan gratis atau bersubsidi, serta beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, dapat menjadi langkah efektif. Fokus pada

pendidikan keterampilan dan vokasi juga dapat membantu meningkatkan peluang kerja bagi lulusan.

2. Optimalisasi Anggaran Bantuan Sosial: Anggaran bantuan sosial harus dikelola secara transparan dan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan dapat diakses oleh penduduk yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, perlu ada evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap program bantuan sosial untuk memastikan dampaknya dalam pengurangan kemiskinan.
3. Peningkatan Kesempatan Kerja: Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Program pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi juga harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan kerja penduduk, terutama bagi mereka yang menganggur atau bekerja di sektor informal.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi di Sumatera dapat berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksari, Y. V. (2024). *Investasi Sumber Daya Manusia | Manfaat Adanya Human Capital Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Feb Unesa.
- Alfath, N. D., Andiny, P., Rizal, Y., Studi, P., Pembangunan, E., & Samudra, U. (2025). *Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*.
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2022). Studi Literatur: Peran Inovasi Pendidikan pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184.
- Ansori, D. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia. *Acceleratig the World’S Research*, 1–9.
- Apriliana Sukmawati, Ukhty Ciptawati, & Heru Wahyudi. (2022). Evaluation of Implementation Indicators for the Family Hope Program in the Field of Education and Health in Sripindowo Village, Bandar Sribhawono District, East Lampung Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(11), 3955–3960. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i11.1721>
- Ardi Adji Taufik Hidayat Hendratno Tuhiman Sandra Kurniawati Achmad Maulana. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinand Indonesia: TinjauanTeoretis dan UsulanPerbaikan*. 1–36.
- Ardian, R., Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 190–198. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i3.90>
- Asngari, I. (2019). *Investasi Dan Akumulasi Pengetahuan Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi*. 2019, 1–50.
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Bank, W. (2019). *education and poverty reduction*. Worldbank.Org.

<https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/education-and-poverty-reduction>

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia. *APBN Induk*, 23–31.

Bps. (2021). *kemiskinan*. Bps Sulawesi Utara. <https://sulut.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>

Bps. (2023a). *Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah*, 2021le. Bps DKI Jakarta.

Bps. (2023b). *persentase penduduk miskin menurut provinsi*. Bps. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

Breton, T. R. (2018). A Human Capital Theory of Growth: New Evidence for an Old Idea. In *SSRN Electronic Journal* (Issue 14). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2456903>

Dirjen Anggaran. (2017). postur apbn indonesia. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1).

Faisah, I. I. U. R. (2013). *lilir*.

Faradiba, F., & Nomleni, M. V. (2024). Analisis Indikator Pendidikan di Indonesia Periode 1994 – 2022. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 121–128. <https://doi.org/10.54082/jupin.273>

Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>

Ilham, D., Rizal, M., Luki, R, K., Saleh, S., & Tri, Joko, B. (2023). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia The Government 's Role in Encouraging the Quality of Education Services in Indonesia. *Pallangga Praja*, 5(2), 155–161.

- Jusnita nina, 2017. (2017). *UUD 45 asli*. 105(3), 129–133.
- Kemendesa. (2007). *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Kementrian Desa.
- Kementrian Keuangan. (2020). *Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Covid-19*. Kemenkeu.Co.Id.
- Kemetrian keuangan. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran*. Kementrian Keuangan.
- Kliwan. (2006). Pengaruh Pertumbuhan Investasi Modal Manusia dan Modal Fisik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Oleh : K l i w a n. *Journal of Economic & Development*, 4(2), 113–132.
- Kurnianingsih, T. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56.
- Lestari, M., Harianto, H., & Falatehan, A. F. (2022). Strategi Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Untuk Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*, 10(2), 745. <https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p03>
- Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015). Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2015.09.004>
- Lubis, H. (2010). *Mengentaskan Kemiskinan : Multidimensional Approaches*.
- Mandasari, J., Katiamas, A., & Katiamas, A. (2022). Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Covid-19 di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2), 249–261. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i2.1386>
- Marini, L., & Putri, N. T. (2020). Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu : Seberapa Besar? *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 70–83. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>
- McInnes, R. J. (2018). Sustainable development goals. *The Wetland Book: I: Structure*

and Function, Management, and Methods, 0042, 631–636.
https://doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_125

Muamil. (2021). *Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 , terutama pasal 33 dan 34 , negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .* Sa. 13–33.

Mukhtaromin. (2024). *Belanja Bantuan Sosial Dalam Perspektif Keuangan Negara.* Kemenkeu. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/belanja-bantuan-sosial-dalam-perspektif-keuangan-negara-629774>

Muliza. (2022). Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan Dan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 352–358.

Multiplier, T. H. E. (1936). *The General Theory of Employment , Interest , and Money* By John Maynard Keynes.

Nabila, N., & Rozaini, N. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Padang Sidempuan. *Niagawan*, 11(3), 224. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i3.36635>

Nabilah, R., & Sugiri, D. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>

Naibaho, M. (2023). , *Fazrina Saumi*. 9.

Nurkholis, A. (2016). *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*. 1–16.

Ohyver, M. (2013). Penerapan Metode Transformasi Logaritma Natural dan Partial Least Squares Untuk Memperoleh Model Bebas Multikolinier dan Outlier. *Jurnal Mat Stat*, 13(Januari), 42–51.

- Pradipta, S. A., & Dewi, R. M. (2020). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 109–115. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115>
- Pratama, M. A. W. (2019). *Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I. Yogyakarta*. 1–17. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/3689>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Putut, N. F., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Mojokerto. *Al-Buhuts*, 17(2), 213–222. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2159>
- Rakasiwi, E. G. (2019). Determinan Pengangguran Terselubung Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–16.
- Rakasiwi, L. S. (2021). Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.1008>
- Reynalda Utari Karo Karo, Rifka Aqiila, Shopia Amanda, Zaskya Humairah, & Nasrullah Hidayat. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Sumatra Utara Tahun 2002-2022. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 260–268. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.137>
- Ross, S. (2023). *What Is the Human Capital Theory and How Is It Used*. Investopedia.
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*, 4(232), 8–16. <https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- Sejati, D. P. (2020). Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 98–105. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.313>

- Sen, A. (1999). *Evaluative Reason : Oxford: Oxford University Press.*
- Soedibyo. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Teknik Bendungan*, 1–7.
- Soemantri, R. (2017). The Influence of Top Management Commitment on Firm Productivity Through Total Quality Management and Management Accounting Information System. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Subroto, G. (2014). Hubungan Pendidikan dan Ekonomi : Perspektif Teori dan Empiris Education and Economics : Perspectives of Theoretical and Empirical. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 6(3), 390–400.
- Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2435>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Susilowati, S. H. (2016). Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 28(2), 91. <https://doi.org/10.21082/fae.v28n2.2010.91-105>
- Todaro & Smith. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition).*
- Tumilar, T. V, Maramis, M. T. B., & Siwu, H. F. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 61–72.

- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Wardiansyah, M., Yulmardi, Y., & Bahri, Z. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera). *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5(1), 13–18. <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3924>
- Wijayanto, A. (2010). Analisis Pengaruh ROA, EPS, Financial Leverage, Proceed terhadap Initial Return. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 1(1), 68–78.
- Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.
- Yanti, N., Nurtati, N., & Misharni, M. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.504>